



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA
TENTANG PEMBAHASAN TANGGAPAN DAN MASUKAN TERHADAP DRAFT LAPORAN VALIDASI EITI
INDONESIA**

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Rapat Tim Pelaksana diadakan dalam rangka untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap draft laporan validasi EITI. Rapat Tim Pelaksana, dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019.

Acara Rapat Tim Pelaksana ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat: Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran – PNBPN, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM (Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan, Ditjen Migas, BPKP, SKK Migas.
2. Asosiasi Industri dan Perusahaan: IPA, APBI
3. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay
4. Sekretariat EITI

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 dihadiri oleh Pemerintah Pusat: Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran – PNBPN, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM (Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan, Ditjen Migas,), BPKP, SKK Migas. Asosiasi Industri dan Perusahaan: IPA, APBI, Masyarakat Sipil : Publish What You Pay, Sekretariat EITI. Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

Kegiatan dilakukan melalui pemaparan draft Hasil Laporan Validasi EITI Indonesia serta mendapatkan masukan dan tanggapan dari Anggota Tim Pelaksana.

C. Pemaparan

2. Bapak Ruwadi – Extractive Industry Specialist Sekretariat EITI

- **Dalam MSG Oversight requirement 1.2 Industry Engagement.** Dalam assessment ini EITI Indonesia dinilai belum memenuhi requirement karena salah satu sebabnya menurut hasil assessment dari sektor industri partisipasinya kurang aktif dalam EITI Indonesia. Salah satunya selain dari pengumpulan data, kontribusi industri tidak dilihat oleh tim validator dalam diskusi-diskusi yang substansial untuk memperkuat implementasi EITI.
- Komentar yang kita masukan yang pertama adalah Industri selalu dilibatkan di dalam proses EITI Indonesia, dan tidak ada peraturan maupun regulasi yang menghambat keterlibatan industri di dalam EITI Indonesia.
- Rekomendasi yang diusulkan oleh tim validator yang pertama adalah Indonesia harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan industri secara penuh dan aktif, yang kedua dan ketiga Indonesia harus memastikan hilangnya hambatan bagi partisipasi perusahaan dalam proses EITI.
- Dari sekretariat merasa sebenarnya tidak ada aturan-aturan yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tidak dapat berpartisipasi, sehingga draft komentar yang kami usulkan yang pertama industri selalu diajak dalam partisipasi EITI Indonesia, yang kedua tidak ada constraint untuk perusahaan dalam berpartisipasi di dalam proses EITI. Serta hal yang paling digaris bawahi oleh validator adanya barrier yaitu terkait dengan kerahasiaan pajak, padahal kerahasiaan pajak ini dapat di atasi dengan adanya authorization letter.
- Sekretariat EITI merasa initial assessment yang disimpulkan oleh tim validator kurang tepat terhadap proses EITI di Indonesia.

Tanggapan Ibu Marjolijn Wajong – IPA

- Apakah ada penjelasan dari tim validator mengenai keterlibatan apa? Dan harus jelas. Menurut pendapat saya rasa penjelasan tim validator ada benarnya. Selama saya mengikuti selain meeting-meeting tim pelaksana itu ada beberapa dimana para industri hadir dan tim dari pusat, dan saat itu data sudah di ambil. Pada saat saya ikut validasi data, saya merasa orang-orang yang menangani data ikut hanya orang finance, tetapi pertanyaannya banyak yang diluar lingkup dari finance. Yang kedua meeting dari pusat untuk komunikasi dengan daerah. Akhirnya saya dimintai tolong jadi saya pilihkan orang-orang yang tepat dari daerah, dan diskusi yang berjalan sangat bagus. Maksud saya, mungkin saya bisa bantu dan saya minta untuk di cc kan saat mengirimkan surat-surat, agar saya bisa langsung menunjuk siapa orang yang tepat atukah dibutuhkan dari group lain yang mengerti bisnis proses agar saat ditanyai oleh EITI pusat kita bisa jawab.

Tanggapan dari Bapak Bayu – SKK Migas

- Sebenarnya bentuk aktif dan efektif kontraktor itu seperti apa? Karena disini sangat general dan tidak jelas. Karena seperti yang kita ketahui bersama selama proses penyusunan ini SKK Migas selalu support dalam memberikan data-data yang diminta. Jadi perlu diperjelas banetuk aktif dan efektifnya itu seperti apa yang diminta oleh validator?

Tanggapan dari SKK Migas

- Yang dimaksud dengan partisipasi perusahaan dalam bentuk UU, seperti contohnya di UU di Migas tentang perubahan skema gross split itu sudah dimasukan dan sudah dijelaskan juga di laporan kontekstual bahwa ada 23 WK, dan sekarang berkembang menjadi 40. Apakah itu sudah menunjukan ke efektifan suatu perusahaan? Apalagi kira-kira yang kurang menunjukannya?

Tanggapan dari Bapak Edi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Karena ini adalah MSG Engagement, keterlibatan anggota tim pelaksana dalam proses EITI yakni transparansi baik dalam rapat-rapat maupun setelah rapat. Misalkan ada putusan-putusan MSG aktif mensosialisasikan hasilnya kepada anggota-anggotanya, disini lain engagement dianggap kurang salah satunya kehadiran dan kurang aktif memberikan saran-saran atau masukan topic of discussion dan sebagainya. Sehingga engagementnya dianggap kurang, jadi prosesnya seolah-olah kita seakan-akan di drive oleh sekretariat EITI padahal sekretariat EITI bukan tim pelaksana kita hanya menampung apa yang didiskusikan di dalam rapat tim pelaksana, topic nya apa, diskusinya seperti apa, permasalahan yang dibahas seperti apa, dan akan kita catat menjadi notulensi dan sebagainya. Termasuk yang diperiksa oleh validator adalah notulensi, daftar kehadiran dan sebagainya setelah itu mereka akan wawancara secara bilateral. Mereka akan menanyakan apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan diluar rapat MSG, dan kita tidak mengetahui jawaban tersebut karena wawancara dilakukan secara bilateral sehingga bisa didapatkan komentar seperti ini dan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Maka dari itu kami memberikan draft coment atas rekomendasi dan initial assessment untuk anggota MSG. Apabila anggota MSG tidak memberikan coment maka akan dibawa sampai ke rapat dewan dan akan menjadi keputusan dewan. Tetapi kami merasa banyak sekali komentar yang tidak sesuai dengan kenyataan. salah satunya yang menjadi persepsi mereka bahwa ada suatu iklim yang tidak membuat anggota MSG bisa berperan aktif, bisa memberikan usulan-usulan, bisa menyampaikan keputusan yang lebih baik. Sehingga workplannya adalah bagaimana mencari solusi untuk mengatasi hambatan itu, sedangkan selama ini kita semua bebas dan kami selalu meminta Anggota MSG untuk aktif, untuk hadir, untuk terlibat dan memberikan masukan. Sehingga kami memberikan jawaban di draft coment tersebut.

Tanggapan dari Bapak Ruwadi - Sekretariat EITI

- Komentar kami yang pertama adalah bahwa industri selalu dilibatkan di dalam proses EITI Indonesia. Namun kami tidak mendelagasikan tanggapan mereka namun kami juga setuju bahwa di masa yang akan datang industri harus lebih aktif di dalam proses EITI Indonesia. Tanggapan yang kedua bahwa Pemerintah Indonesia secara umum dan secara khususnya adalah pelaksanaan EITI di Indonesia selalu menyambut baik partisipasi dari perusahaan-perusahaan di dalam proses EITI dan tidak ada hambatan atau constraint bagi perusahaan untuk berpartisipasi di dalam proses EITI tersebut. Yang ketiga kami juga minta klarifikasi dari DJP berkenaan dengan tax confidentiality provision bahwa ini sudah menjadi hukum yang berlaku di Indonesia dan kami

memperceyailah ini juga sudah berlaku di Internasional bahwa data-data perpajakan ini bersifat rahasia. Dan pengungkapan informasi perpajakan hanya dapat melalui 2 cara yang pertama adalah Letter Of Authorization dari perusahaan yang bersangkutan dan yang kedua adalah exemptions dari Kementerian Keuangan. Kemudian point nomor 3 bagian kedua kami menyetujui bahwa karena ada salah satu point di dalam hasil assessment mereka salah satu permasalahannya adalah anggota MSG ini tidak cukup melakukan authorized sosialisasi ke perusahaan-perusahaan bidang industri ekstraktif. Di point ini kami menyetujui kalau perlu asosiasi industri kalau perlu memperluas keanggotaan perusahaan sehingga ini bisa menambah perusahaan-perusahaan lebih aktif di dalam proses EITI Indonesia.

Tanggapan Ibu Marjolijn Wajong – IPA

- Hanya 99% perusahaan ikut IPA, kalau di migas kan ada SKK Migas. Mungkin untuk kedepan IPA bisa kerjasama dengan SKK Migas untuk membuat acara yang mengundang perusahaan-perusahaan untuk penjelesan mengenai EITI.

Tanggapan dari Erman J (Ditjen Anggaran)

- Proses validasi ini tahun berapa? Kalau ingin menjelaskan tentang gross split kalau ada perkembangan bahwa pemerintah telah menganjurkan terkait gross split.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Tim validasi datang ke Indonesia tahun 2018 untuk memvalidasi Laporan tahun 2015. Untuk data revenue kita sampai tahun 2015. Untuk data kontekstual sampai tahun terakhir. Dan gross split sudah di bahas pada laporan tersebut. Barangkali lebih keterlibatan perusahaan/ asosiasi dalam penyusunan regulasinya.

Tanggapan Ibu Ermi – PWYP

- Untuk comment nomor 3, di dalam susunan keanggotaan MSG mungkin ada satu yang belum tercapai yaitu dari segi BUMN migas ada itu Pertamina dari mineral belum ada, yang mungkin sudah ada dari sisi asosiasi ada APBI dan IMA namun untuk state owned enterprises belum terlihat. Kalau saya usul apakah memungkinkan jika dalam comment dicantumkan misalnya tentang lingkungan yang kondusif, dia menilai berapa banyak anggota MSG yang tidak berpartisipasi, kalau yang banyak dibahas saat validasi salah satunya IPA yang kurang berpartisipasi. Namun sekarang partisipasi IPA mungkin sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Menurut saya saat ini mungkin bisa disampaikan bahwa EITI Indonesia mempunyai langkah yang progresif untuk meningkatkan partisipasi di sektor ini.

3. Bapak Ruwadi – Extractive Industry Specialist Sekretariat EITI

- Requirement 1.4 MSG Governance, Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Ada tantangan besar menyangkut keterwakilan semua konstituen. Kurangnya pejabat pemerintah senior dan kurangnya pemahaman dan kesadaran bersama akan peran MSG telah memengaruhi kecekatan dan kualitas proses pengambilan keputusan dan implementasi secara umum. Diskusi-diskusi MSG kelihatannya sebagian besar

terbatas pada fokus pada publikasi laporan dan urusannya sendiri. Tidak sedikit bukti upaya-upaya pemerintah untuk memastikan kontribusi proses EITI bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam. Muncul kekhawatiran akan efisiensi struktur MSG saat ini.

- Rekomendasinya adalah Indonesia dituntut untuk memastikan keterwakilan konstituen secara memadai, yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan kemampuan, kesediaan, dan ketersediaan yang mencukupi untuk berkomitmen pada proses EITI. Yang kami pahami yang menjadi permasalahan secara umum yaitu lack of senior government officials and lack of common understanding and awareness of the MSG sehingga rekomendasi nomor satu mereka adalah ensure that the constituencies are represented yang cukup direpresentasikan kemudian yang terdiri dari stakeholders yang terdiri dari sufficient capacity, willingness and availability to commit to the EITI Process. Kalau kami baca secara detail di dalam laporan validasi secara umum salah satu point untuk menilai yaitu peraturan yang menaungi EITI, sedangkan kita berdasarkan peraturan adalah Perpres Nomor 26 Tahun 2010, di situ memang personil-personil tim pelaksana yang mengetuai yaitu eselon 1. Namun mereka melihat di dalam laporan itu yang memimpin rapat kebanyakan eselon II dan juga sekretariat. Hal ini yang digaris bawahi oleh mereka sehingga kami tidak bisa memberikan komentar yang bersifat membela diri dalam point ini.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Hal ini menjadi salah satu keluhan dari EITI Internasional dan World Bank yang saat itu menjadi salah satu pendonor kita. Mereka berpendapat kenapa yang hadir bukan anggota yang sebenarnya sesuai dengan Perpres. Sehingga mereka saat itu mengusulkan membuat suatu alternate yang ditunjuk seperti SOP EITI Internasional yakni apabila anggota MSG tidak bisa hadir khususnya yang dari governance harus ada alternatifnya dan alternatifnya ditetapkan siapa. Saya juga sudah menjelaskan bahwa hal ini tidak bisa diterapkan di governance Indonesia, karena kita bersifat delegasi dan yang penting adalah substansi nya kita bahas secara baik dan apabila alternatifnya tidak bisa memberikan keputusan maka akan dikonsultasikan ke atasan. Namun terkadang mereka menangkapnya salah yakni governance tidak ada kepedulian. Saya juga sudah menjelaskan bahwa hal yang harus ditangani oleh pejabat eselon I banyak, namun jawaban tersebut ditangkap lagi oleh mereka kurangnya kepedulian terhadap EITI. Maka dari itu kami belum memberikan komentar kalau bapak/ibu setuju saya tidak tau atau kita diamkan saja. Sebab saat kami mengubah perpres dengan menurunkan keanggotaan eselon 1 itu susah, karena Perpres itu Presiden hanya bisa menunjuk 1 level maksimum 2 level di bawah Presiden. Maka dari itu kita masih kesulitan dalam tata kelolanya.

Tanggapan dari Bapak Erman J (Ditjen Anggaran)

Dalam kaitan ini kita sudah ada regulasi bahwa pimpinan di level II seperti dirjen atau sekjen itu ada pendelegasian wewenang. Mungkin untuk kedepannya apakah kita mau merapatkan apabila itu terjadi itu stop saja di level I setuju atau tidak setuju di level teknis yaitu ada pendelegasian wewenang mungkin bisa dijelaskan disitu, pendelegasian wewenang tapi tanggung jawabnya tetap di eselon 1 atau menteri. Mungkin itu saja diperjelas ke mereka.

Tanggapan Ibu Marjolijn Wajong – IPA

- Menurut saya apakah eselon 1 itu setuju dan komit? Usulan boleh saja tetapi kita harus mengembalikan kepada yang memimpin, bagaimana kita maunya apapun itu mereka sepakati, mereka lakukan ya baik adanya menurut saya.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Di Indonesia sistemnya adalah terjadi proses pendelegasian wewenang, tetapi keputusan akan konsultasikan dengan anggota MSG yang sebenarnya.

Tanggapan dari Ditjen Minerba

Menurut saya perlu ada pertemuan minimal 1 tahun sekali dan ini dikhususkan untuk level menteri dan eselon 1. Disamping itu terkait laporan ini, bahasanya saya kira terlalu banyak bahasa negatif.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Pada tahun 2016 kami sudah pernah mencoba high level retreat, saya sudah antisipasi sebelumnya yang kemungkinan hadir level 1 sangat sulit maka di dalam high level retreat itu saya bikin dibuka melalui working dinner. Diharapkan kalau jam kerja eselon 1 susah untuk hadir, maka diharapkan kalau working dinner paling tidak beberapa eselon 1 bisa hadir. Namun sayang saat itu eselon 1 tidak bisa hadir, hanya eselon 2 . mungkin nanti kita coba kembali , karena idealnya 1 tahun sekali kita mengadakan acara seperti itu.

Tanggapan Ibu Ermi – PWYP

- Saya lihat EITI itu seperti formal requirements, jadi kalau boleh saya usulkan seperti di CSO ini kita ada pemilihan setiap 3 tahun sekali untuk memilih 3 alternate. Kita juga harus lebih memperbaiki legal mekanisme.

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Kalau disetujui, di saat alternatif adanya surat penugasan atau paling tidak menunjukkan disposisi yang formal kita dibagikan.

4. Bapak Ruwadi – Extractive Industry Specialist Sekretariat EITI

- Pada point kedua tentang industri bahwa proses seleksi industri ini harus lebih open dan transparan. Apabila kita membaca lebih detail hasil validasi laporannya yang dipermasalahkan adalah bahwa tidak adanya dokumentasi industri representative dari MSG tentang seleksi dan prosesnya. Hal ini tidak ada dokumentasinya, dan mereka membandingkan dengan CSO karena di CSO proses seleksinya sampai ada list terpilih. Namun di dalam industri disebutkan di dalam dokumen ini sifatnya hanyalah pemberitahuan kepada pemerintah bahwa dari IMA dan APBI tentang pemilihan yang sudah terjadi. Hal ini lah yang menjadi permasalahan rekomendasi dalam point ini.

Tanggapan Ibu Marjolijn Wajong – IPA

- Saya tidak mengerti kalau dari Industri khususnya migas, seleksi apa yang dimaksud?

Tanggapan dari Bapak Edi Effendi Tedjakusuma – Sekretariat EITI

- Validator selalu melihat yang lain prosesnya dianggap bagus kebetulan di CSO untuk memilih 3 wakil CSO dan 3 orang alternate mereka melakukan proses seleksi. Saat saya menanyakan ke APBI, IMA, IPA tidak ada proses seleksi melainkan melalui penunjukan langsung dalam hal perwakilan. Saya sudah menyampaikan hal tersebut kepada validator, namun kembali lagi terkadang komentar dari validator suka tidak sesuai dengan kondisi di sini. Saya mencurigai karena validator memvalidasi berbagai negara, sehingga komentar mereka itu mungkin copy paste dari negara lain. Walaupun kami sudah menjelaskan bahwa proses di CSO dan proses di Instansi itu berbeda, namun karena menurut mereka proses di CSO itu bagus maka mereka mengharapkan kita seperti itu juga.

5. Bapak Ruwadi – Extractive Industry Specialist Sekretariat EITI

- Disini komentar kami terkait point tersebut, kami menjelaskan bahwa perwakilan industri itu ditunjuk oleh asosiasi industri tersebut yang prosesnya dilakukan secara internet.
- Komentar nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, komentar kami atas rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan di dalam proses EITI Indonesia.
- Komentar nomor 6, terkait dengan TOR dari MSG itu sendiri perlu dipastikan anggota MSG nya memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya, salah satunya terkait dengan kehadiran.

Tanggapan Ibu Marjolijn Wajong – IPA

- Menurut saya kita sudah melaksanakan komentar-komentar tersebut tetapi disesuaikan dengan prosedur yang ada di Indonesia. Kami selama ini dikelola oleh SKK Migas, dan SKK Migas juga mempunyai beberapa perwakilan di beberapa daerah jadi bagaimana kita berkomunikasi itu dirumuskan bersama, sedangkan kalau kita disuruh langsung itu sudah menyalahi aturan.

Keputusan Rapat

Sekretariat EITI akan mengirimkan draft tanggapan hasil validasi dari EITI Internasional untuk mendapatkan tanggapan dari Tim Pelaksana EITI.